



ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2022

Drs. BOB RF SAGALA, M.Si

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

Disampaikan pada Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya
Prov. Jawa Barat tanggal 21 Januari 2021

1

PENDAHULUAN

PENYUSUNAN RKPD 2022



Dasar Hukum

- UU 23/2014 – Pemerintahan Daerah
- PP 12/2019 – Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri 86/2017 - Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RanPerda Ttg RPJPD & RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD & RKPD
- Permendagri 70/2019 – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
- Permendagri 90/2019 – Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuda



Pedoman Substansi RKPD

- RPJMN 2020-2024
- RKP 2022
- Program Strategis Nasional
- RTRW
- RPJPD
- RPJMD - KLHS

Koordinasi Peny. RKPD oleh Kemendagri

- Pedum Penyusunan RKPD
- Kortekrenbang
- Musrenbang 34 Provinsi
- Fasilitasi Ranpergub ttg RKPD

Definisi

RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ps. 263 (3) UU 23/2014



Tahapan Penyusunan

1. Persiapan
2. Penyusunan Ranc. Awal
3. Penyusunan Ranc.
4. Penyusunan Rancangan Akhir
5. Musrenbang
6. Penetapan

Substansi RKPD

- I. Pendahuluan
- II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- III. Kerangka Ekonomi & Keuangan Daerah
- IV. Sasaran & Prioritas Pembangunan
- V. Arah Kebijakan Pembangunan
- VI. Rencana Kerja & Pendanaan Daerah
- VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

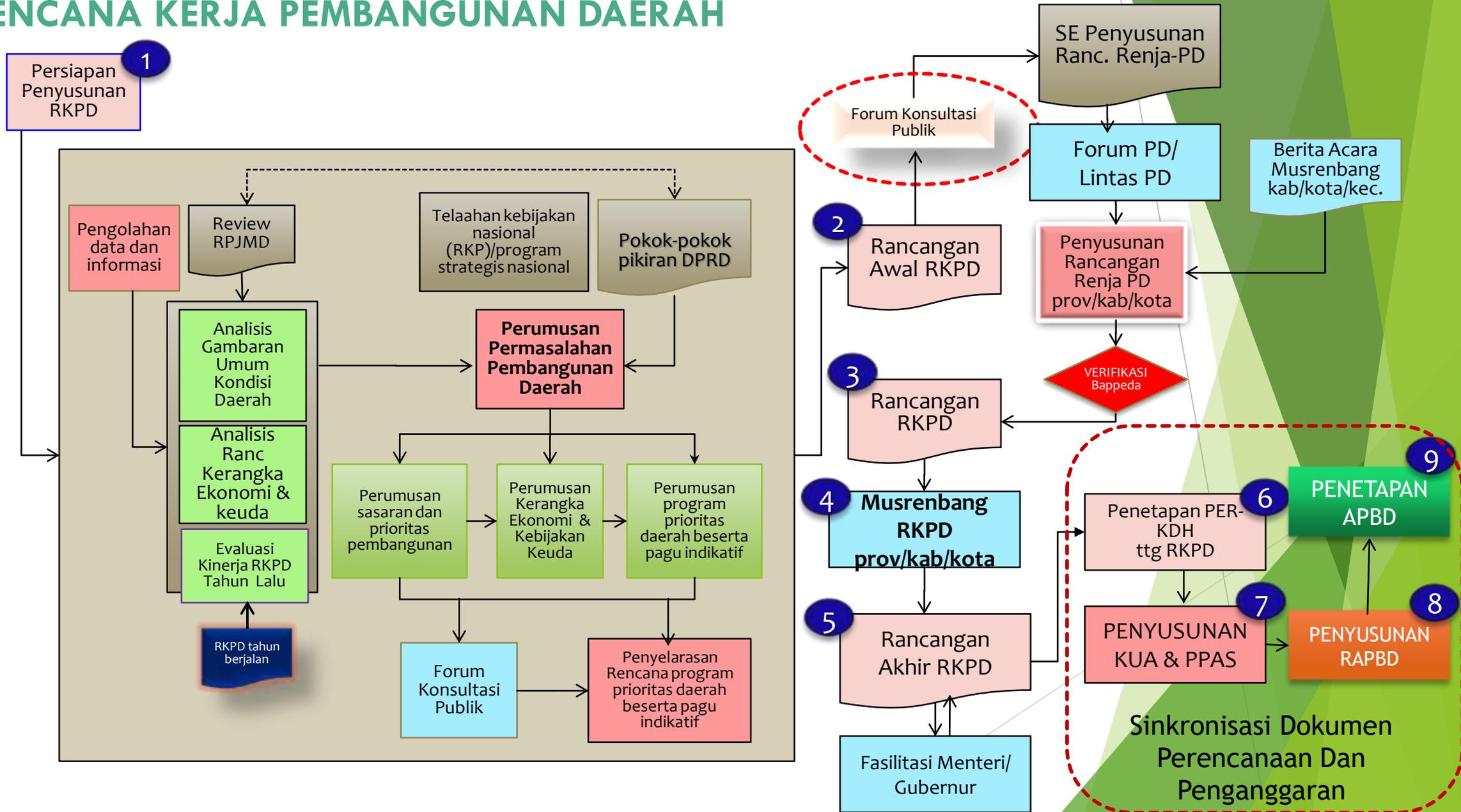
Sanksi

Apabila kepala daerah tidak menetapkan **Perkada** tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama **3 (tiga)** bulan.

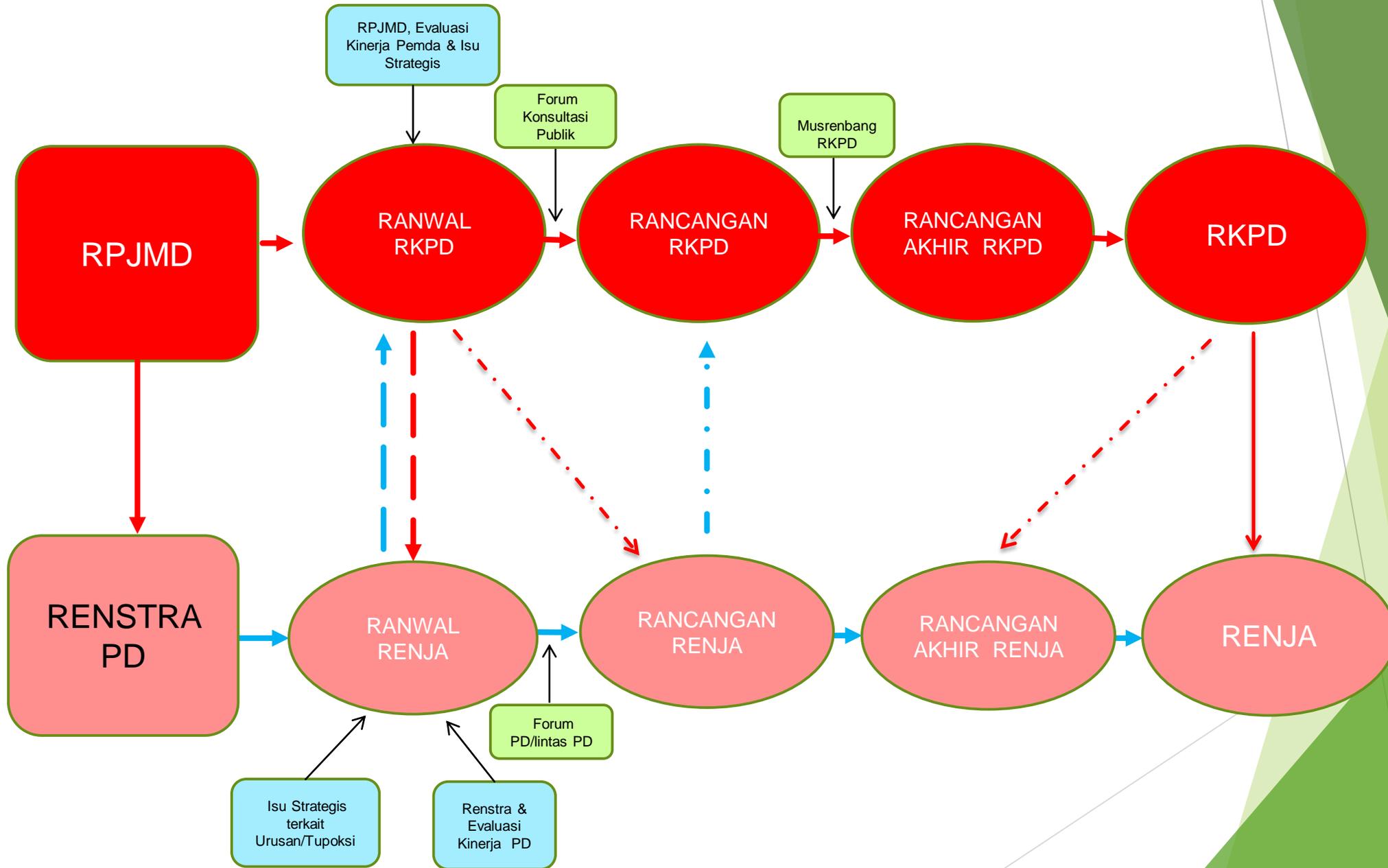
- Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Ps 265 (2) dan (3) UU 23/2014

Fungsi

BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH



RKPD dan Renja PD



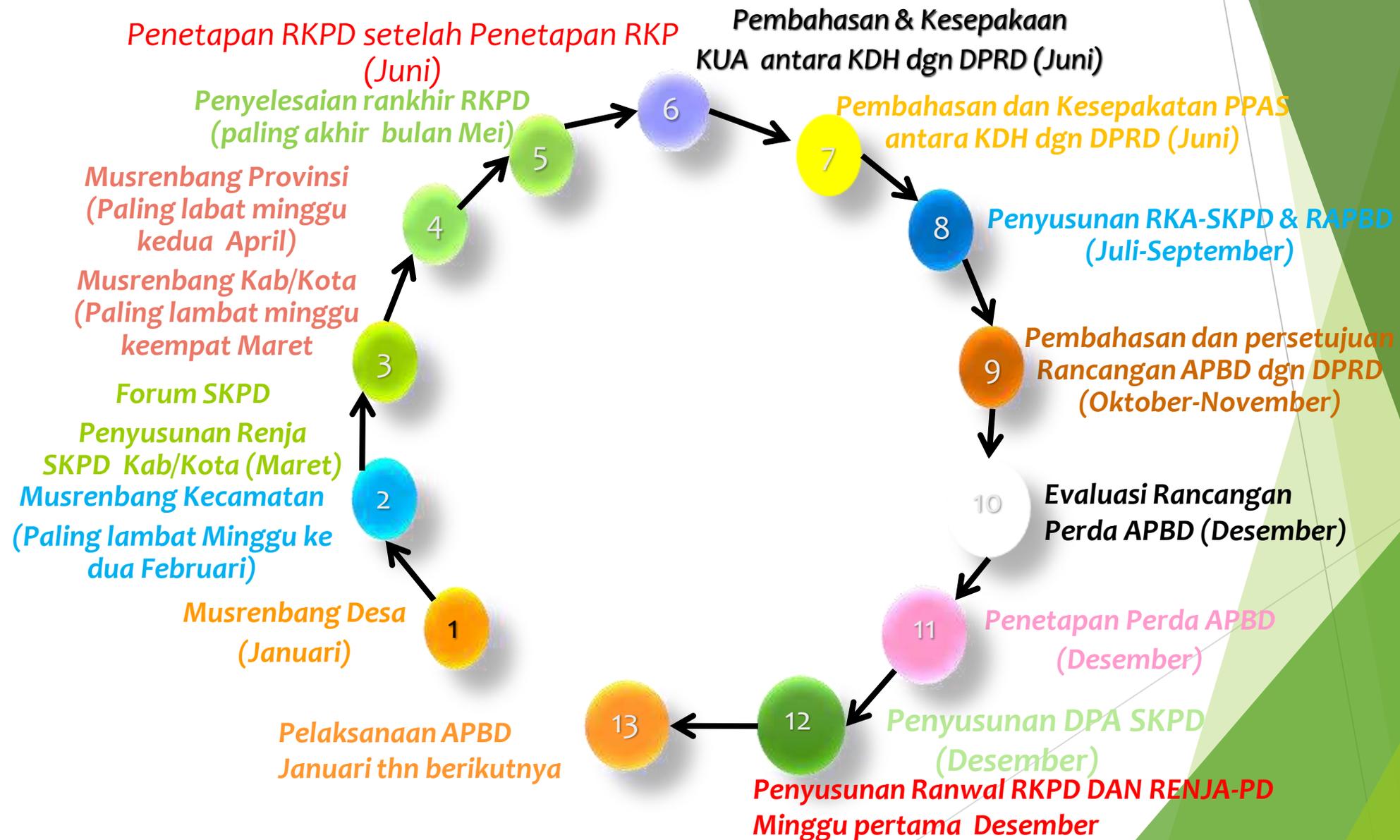
Teknis Penyusunan Renja PD



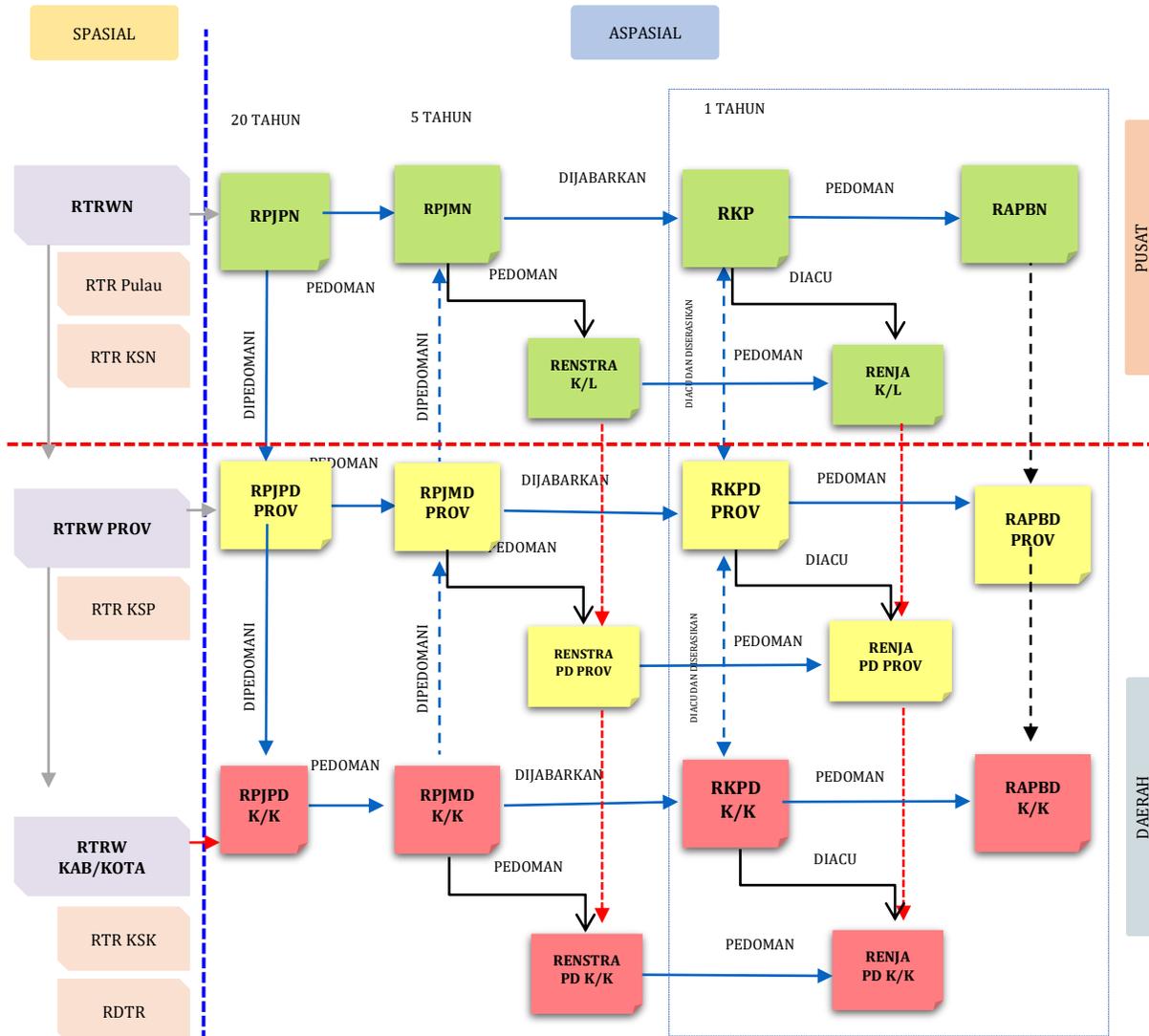
“Renja merupakan penjabaran dari Renstra”

“ Σ Renja = RKPD ”

SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH



RENCANA PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG DALAM MENJAWAB ISU STRATEGIS PEMB. DAERAH



Program dan kegiatan yang dikembangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokrenda: RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD), RKPD, Renja PD) ke depan, harus mampu:

- Mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan daerah antarwilayah
- Mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas
- Memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu
- Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif
- Mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi

2

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022

KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022

1

KAIDAH

Tata cara penyusunan tetap menggunakan kaidah-kaidah dalam Permendagri No 86 Tahun 2017, termasuk patokan waktu penyusunan RKPD 2022. Tidak ada perbedaan proses penyusunan RKPD 2022 untuk daerah yang menyelesaikan RPJMD/Perubahan sebelum penetapan RKPD 2022 ataupun sesudah penetapan RKPD 2022

2

**PERMENDAGRI 90/2019
DAN PEMUTAKHIRANNYA**

Untuk nomenklatur dan sistem kodefikasi program/kegiatan/subkegiatan, mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya pada Kepmendagri No. 050-3708

3

TERINTEGRASI

Terintegrasi antara sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan

4

**HASIL EVALUASI
KINERJA**

Mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya, hasil evaluasi kinerja Renstra PD periode sebelumnya, dan hasil evaluasi kinerja RKPD & Renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan (2019 dan 2020)

5

**KONSISTENSI/
KESELARASAN**

Memperhatikan konsistensi kinerja perencanaan sampai dengan kinerja penganggaran, serta adanya keselarasan antara dokumen perencanaan.

6

SIPD

Mengutamakan penggunaan aplikasi SIPD dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah.

KATEGORISASI KONDISI DOKRENDA SAAT INI

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026



RKPD 2022 UNTUK DAERAH YANG MELAKUKAN PENYUSUNAN RPJMD BARU

Kondisi:

- 1) RPJMD belum tersusun dan disusun bersamaan dengan RKPD 2022
- 2) Renstra PD baru dan Renja PD belum tersusun dan disusun bersamaan dengan RKPD 2022



RKPD 2022 UNTUK DAERAH YANG SEDANG MELAKUKAN PERUBAHAN RPJMD PERIODE BERLAKU

Kondisi:

- 1) Perubahan RPJMD belum tersusun dan disusun bersamaan dengan RKPD 2022
- 2) Renstra PD perubahan dan Renja PD belum tersusun dan disusun bersamaan dengan RKPD 2022



RKPD 2022 UNTUK DAERAH YANG TELAH MELAKUKAN PERUBAHAN RPJMD

Kondisi:

- 1) RPJMD Perubahan sudah berisi program berdasarkan Permendagri 90/2019, belum pemuatn. (Ada juga yg msh PMDN 13/2006*)
- 2) Renstra PD Perubahan sudah berisi kegiatan dan subkegiatan sesuai Permendagri 90/2019, belum pemuatn. (Ada juga yg msh PMDN 13/2006*)



RKPD 2022 UNTUK DAERAH YANG TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN RPJMD

Kondisi:

- 1) RPJMD masih berisi program berdasarkan Permendagri 13/2016
- 2) Renstra PD berisi program dan kegiatan Permendagri 13/2016

01 DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK 2020

RPJMD	RENSTRA	RENJA 2022	RKPD 2022
Periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026*	Disusun berdasarkan kewenangan perangkat daerah peraturan Per-UU-an dan memperhatikan tujuan/sasaran Ranc. RPJMD	Disusun berdasarkan kewenangan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan Per-UU-an	Disusun sbg Sigma Ranc. Renja PD 2022 dengan tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tujuan/sasaran Ranc. RPJMD
Memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ RPJMN 2020-2024 ▪ RPJPD 2005-2025 ▪ Cascade visi/misi sd program PD ▪ RPJMD Teknoratik dan KLHS 	Memperhatikan NSPK terbaru dan Renstra K/L 2020-2024 serta isu berkembang	Memperhatikan Rancangan RKP/ RKP Tahun 2022 dan isu berkembang	Memperhatikan : <ul style="list-style-type: none"> • RPJPD 2005-2025 • PMDN tentang Penyusunan RKPD 2022 • Mempertimbangkan visi, misi, calon Kepala daerah terpilih • Rancangan RKP/ RKP Tahun 2022 • Isu berkembang
Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja RPJMD lama	Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra PD periode sebelumnya	Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renja 2019 & 2020	Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya
Menggunakan nomenklatur program PMDN No, 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708	Menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan PMDN No 90/2019 & Kepmendagri Nomor 050-3708	Menggunakan nomenklatur program, kegiatan, & subkegiatan PMDN No, 90/2019 & Kepmendagri No. 050-3708	Menggunakan Nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan PMDN No 90/2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708
Memuat substansi RKPD 2022 sbg bagian RPJMD	Memuat substansi R/Renja 2022 sbg bagian Renstra PD	Diproyeksikan menjadi bagian dari Ranc Rentra	Diproyeksikan menjadi bagian dalam RPJMD yang ditetapkan

ARAHAN LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RKPD 2022 UNTUK DAERAH YANG MELAKSANAKAN PILKADA SERENTAK 2020

Agar segera melakukan berbagai persiapan penyusunan RPJMD, diantaranya menetapkan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan keputusan kepala daerah tentang Tim Pembuat KLHS RPJMD.

Dengan kondisi Renstra PD yang belum tersusun, dalam hal penyusunan RKPD Tahun 2022, Kepala Bappeda mengoordinasikan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja PD 2022 diproyeksikan menjadi bagian pada Rancangan RPJMD dan Renstra PD periode 2021-2026.

Lebih lanjut penyusunan RKPD Tahun 2022 secara teknis akan diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD 2022

1. Dalam hal daerah sedang melakukan proses penyusunan RPJMD sebagai tindak lanjut hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;
 - b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota;
 - c. evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra perangkat daerah periode sebelumnya;
 - d. evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2020 dan Renja PD Tahun 2020; dan
 - e. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
2. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai satu kesatuan dari indikasi program perangkat daerah dalam penyusunan rancangan RPJMD periode selanjutnya.

TEMA RKP TAHUN 2018-2021, DAN PENYUSUNAN TEMA RKP 2022



- RKP 2022 merupakan RKP tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024;
- Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar mensinergikan rencana kerja tahunannya dengan RKP 2022;
- Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dalam RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP 2022;
- Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memastikan kesiapan pelaksanaan program dan proyek; dan
- Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memperkuat sistem pengendalian pelaksanaan program dan proyek.

PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

- Kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan

3

ISU-ISU PEMBANGUNAN

PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA DAN JABAR

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

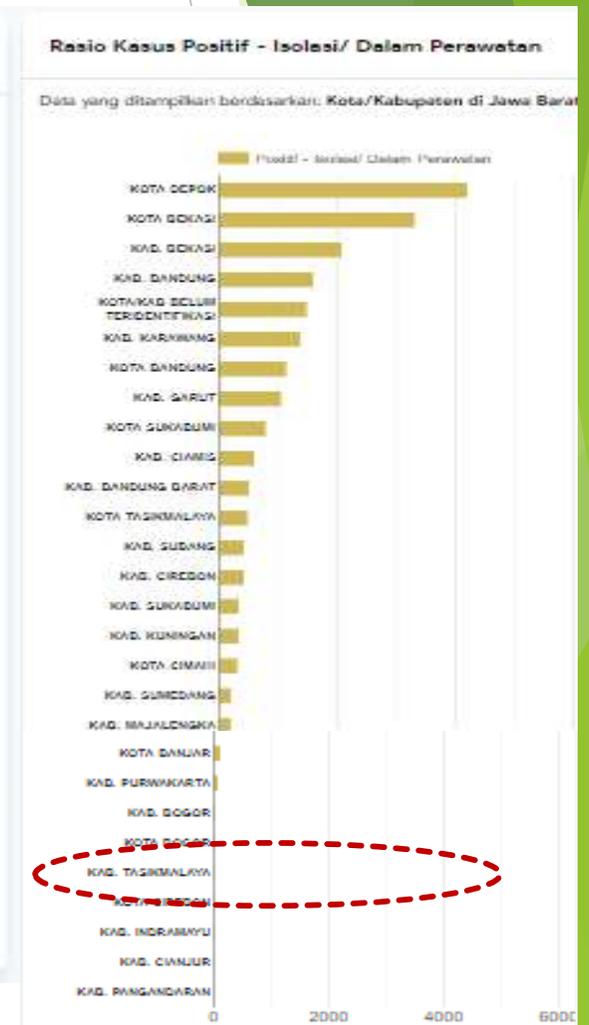
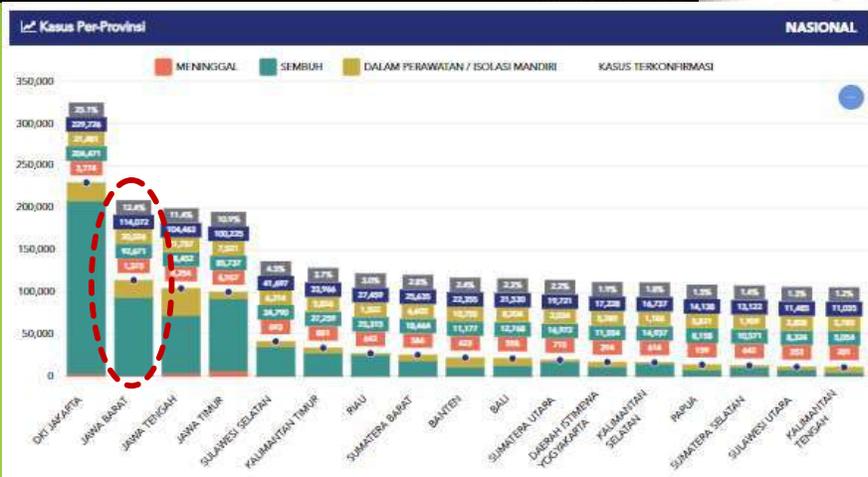
“Pandemi covid-19 ini pandemi TERLUAS dalam sejarah umat manusia.”

“Kita semua harus memiliki sensitivitas yang sama, hanya bisa dilawan jika kita bersatu, bekerjasama dan bergotong royong melawan Covid-19.”

MENTERI DALAM NEGERI PROF. HM. TITO KARNAVIAN Ph.D

JAKARTA, 18 APRIL 2020

Prov. Jabar jumlah kasus terbesar ke-2 se-Indonesia
Kabupaten Tasikmalaya jumlah kasus terbesar ke-24 se-Jabar



Sumber : covid19.go.id per 19 Des 2020

Sumber : pikobar.jabarprov.go.id per 19 Des 2020

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

01

DIPERKIRAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELAMBAT

02

PENINGKATAN PENGANGGURAN

03

PENINGKATAN KERAWANAN SOSIAL/KRIMINALITAS

04

ANGKA KEMISKINAN NAIK

05

RAWAN PANGAN

06

KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI MENINGKAT

07

PENURUNAN KONTRIBUSI DARI SEKTOR PARIWISATA, INDUSTRI, DAN JASA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI

08

INFLASI MENINGKAT

09

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHAMBAT



Arah Kebijakan Perencanaan dan Keuangan Daerah selama Pandemi Covid-19

REORIENTASI BELANJA MODAL

Infrastruktur Sosial (Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan); Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan); Perumahan MBR (Rutilahu); Penataan Kawasan Khusus (Alun-alun, Destinasi Wisata, *Creative Center*), serta Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).

DUKUNGAN PEMULIHAN EKONOMI SEKTOR RIIL

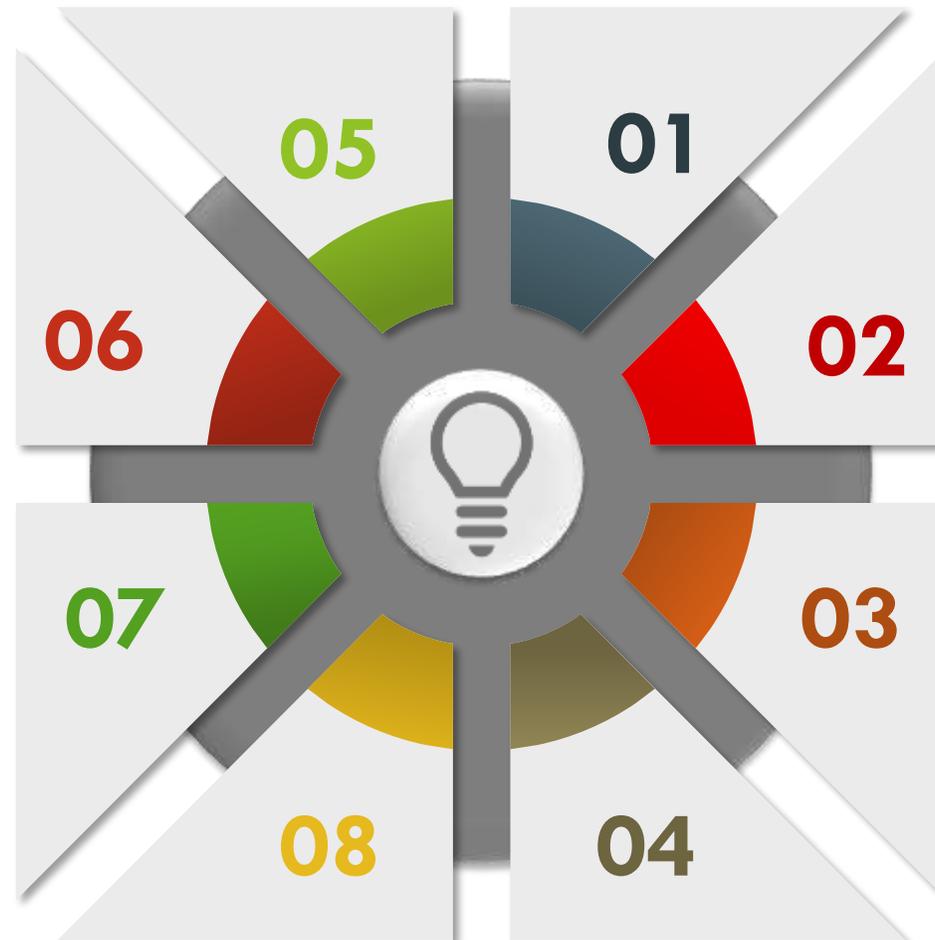
Menjamin penyaluran dana kpd UMKM, perluasan padat karya, ketahanan pangan., dan meningkatkan stimulus belanja spt insentif sektor pariwisata, percepatan pengadaan barang dan jasa keperluan Covid-19

ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)

Percepatan dan perluasan ETPD dalam rangka mendorong transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengoptimalkan penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19.

PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Penegakan disiplin protokol Covid-19, tetap memprioritaskan perlindungan sosial terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan (PKH) serta sektor informal, perluasan Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja



SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didukung SIPD sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat daerah dan nasional

PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Menjaga keberlanjutan fiskal, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel dan transparan, terutama dalam pengelolaan pembiayaan alternatif pembangunan daerah, termasuk salah satunya Pinjaman PEN Daerah

KERJA SAMA ANTARDAERAH

Pengembangan kolaborasi yang inovatif melalui kerja sama antardaerah diharapkan menghasilkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, mengatasi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kohesivitas wilayah

EVALUASI HIBAH DAN BANSOS

Evaluasi intensif terhadap sasaran, kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hibah dan bansos akan memberikan *feedback* yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos

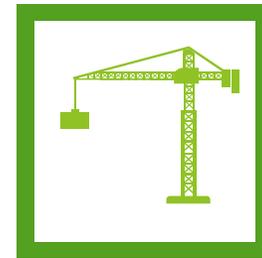
ARAH PENANGANAN DAN PEMULIHAN PASCA COVID-19 DI DAERAH

Untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM, dunia usaha, dan Pemda



Pemulihan Ekonomi

- Pembangunan infra aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi.
- Pembangunan & perbaikan fasilitas layanan sektor tertentu dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja,
- Perbaikan sistem pelayanan investasi daerah.
- Melanjutkan beberapa program DAK Prioritas yg ditunda di 2020.



Peningkatan Belanja Infrastruktur Daerah

- Pemanfaatan *creative financing*, seperti pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah dan/atau KPBU.
- Pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerja sama antar Daerah.
- Dukungan TKDD untuk pelaksanaan *creative financing* melalui skema pendanaan terintegrasi (*integrated funding*).



Sinergi TKDD dan K/L dalam *Human Capital Development*:

- Pengetatan *mandatory spending* DTU utk Pendidikan dan Kesehatan.
- Dukungan untuk program merdeka belajar.
- Peningkatan kemampuan pelayanan RS dan FKTP.

Selain dampak kesehatan dan pelemahan ekonomi, Covid-19 berdampak signifikan dalam pelaksanaan APBD 2020:

- Volume APBD turun signifikan, dimana belanja APBD secara nasional turun hingga 30% (setara Rp383 T)
- Penanganan kesehatan dan peningkatan bansos untuk *social safety net* menyebabkan realokasi belanja daerah secara besar-besaran
- Program2 pembangunan fisik hampir 50% ditunda atau dibatalkan

SARAN ARAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

02

Melakukan refocusing pembangunan infrastruktur selama pandemi misalnya dengan **memperkuat infrastruktur pelayanan dasar**, terutama kesehatan (puskesmas, puskesmasdes), dan penunjang kesehatan (sanitasi dan air minum layak), infrastruktur penunjang ekonomi (energi dan telekomunikasi), dan infrastruktur perdesaan (penunjang ketahanan pangan)

04

Dengan asumsi pandemi telah dapat dikendalikan (Tahun 2022), pembangunan infrastruktur diarahkan untuk **mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki backward-forward linkage yang luas**, sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan, seperti pariwisata (perhotelan, industri dan jasa pendukung pariwisata, ekonomi kreatif), industri (UMKM), perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral (listrik untuk rakyat), dan kehutanan (perhutanan sosial)

05

Pelaksanaan belanja modal, barang, dan jasa dalam pembangunan infrastruktur diutamakan **memiliki kandungan lokal yang paling optimal**

03

Pembangunan **infrastruktur berbasis ICT** menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.

01

Mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang ada, secara rasional perlu dilakukan **reprioritisasi jenis proyek** yang akan dibangun sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar dan tidak menjadi beban fiskal pada masa mendatang



ISU PEMBANGUNAN URUSAN KESEHATAN



APA ITU STUNTING?



Stunting (kerdil) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah dua tahun yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama (kronis)

STUNTING UMUR SAMA BEDA TINGGI

Di Indonesia, satu dari tiga anak mengalami gangguan pertumbuhan karena masalah kekurangan gizi. Malnutrisi sudah terjadi sejak dalam kandungan lalu mulai tampak saat berumur 2 tahun.

8 JUTA

Pada 2018, ±8 juta anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan

37,2%

Prevalensi stunting di Indonesia, artinya setidaknya 1 dari 3 anak Indonesia mengalami *stunting*

60

Pada 2019 akan ditambah 60 kabupaten/kota menjadi fokus penurunan *stunting* setelah setelah 100 lokasi di 2018.

Stunting

Stunting adalah tinggi badan yang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya di umur yang sama.

Penyebab

Kurangnya asupan gizi yang diterima janin/bayi.

Dampak

- Mudah sakit
- Kemampuan kognitif berkurang
- Saat tua berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan
- Fungsi-fungsi tubuh tak seimbang
- Postur tubuh tak maksimal saat dewasa.
- Kerugian ekonomi

Pencegahan

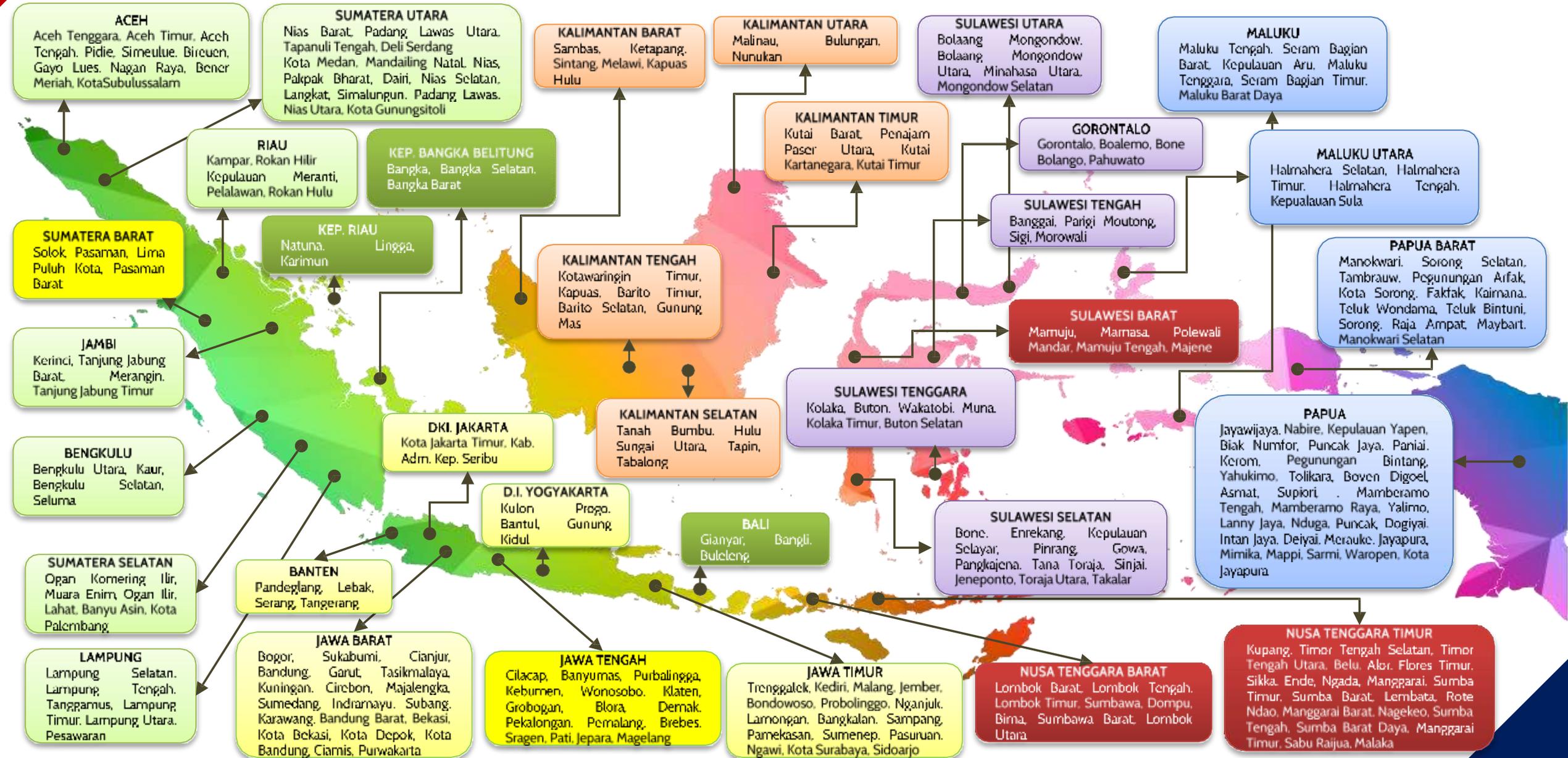
- Berikan ASI dan MPASI
- Akses air bersih dan fasilitas sanitasi
- Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil
- Memantau pertumbuhan Balita di Posyandu



Sumber: Tempo.co Desain: Moerat Sitompul



260 Kabupaten/Kota Lokus Tahun 2020 Untuk Intervensi Stunting



OUTLOOK TAHUN 2022 SEBAGAI ANTISIPASI PERENCANAAN

Penerapan berbagai kebijakan sebagai implikasi terbitnya:

- UU CK (*Omnibus Law*)
- RPP BAS Daerah
- Revisi PMDN 86/2017, dll

Bank Dunia dan beberapa ekonom memperkirakan **ekonomi Indonesia akan melalui proses pemulihan tahun 2022**, meskipun masih dibayangi risiko dan tantangan terkait keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. **Pertumbuhan ekonomi** di tahun 2021 diprediksi berada dalam rentang 3-4,4% dan **di tahun 2022 sebesar 5,1%**. **Angka kemiskinan ekstrim yang diproyeksi kembali meningkat** untuk pertama kalinya sejak 2006 lalu.

Proses/penyelesaian Prioritas Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam RPJMN 2020-2024

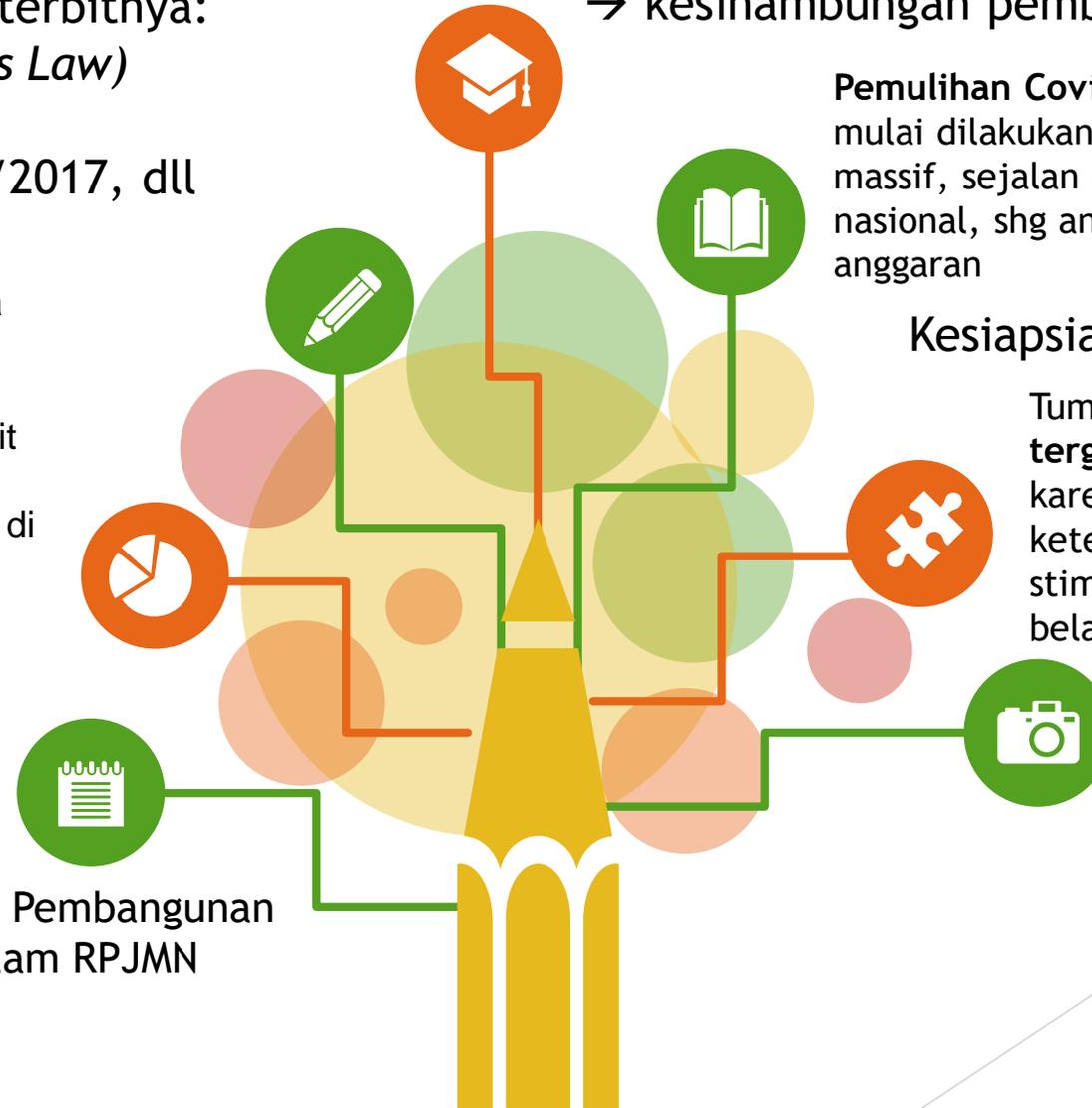
RPJMD Kab. Tasikmalaya Periode 2021-2026
→ kesinambungan pembangunan

Pemulihan Covid-19: Vaksinasi dilakukan 2021 sudah mulai dilakukan, dan diperkirakan 2022 akan relatif massif, sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, shg antisipasi refocusing dan realokasi anggaran

Kesiapsiagaan Bencana (Alam-NonAlam)

Tumpuan perekonomian negara masih **tergantung pada belanja negara/ pemerintah**, karena swasta masih berusaha bangkit dari keterpurukan, shg strategi mengarah ke stimulus UMKM, kerja sama daerah, efisiensi belanja

Perkembangan dan pemanfaatan **teknologi informasi (Rev. 4.0)**, menyangkut/mempengaruhi penyediaan infrastruktur ICT, metode kerja, pola interaksi, dll



4

PENUTUP

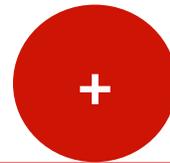
PENUTUP

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 antara lain:

- 1 Memperhatikan kategorisasi penyusunan RKPD Tahun 2022, menyesuaikan proses dan substansinya, serta mengaplikasikannya dalam SIPD
- 2 Menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan dampak pandemi *Covid-19*
- 3 Hasil pengendalian dan evaluasi, harus menjadi salah satu acuan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan
- 4 Penyesuaian dan penajaman substansi indikator hasil (*outcome*) berdasarkan hasil pemutakhiran *cascading*
- 5 Memperhatikan berbagai regulasi terbaru, seperti PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

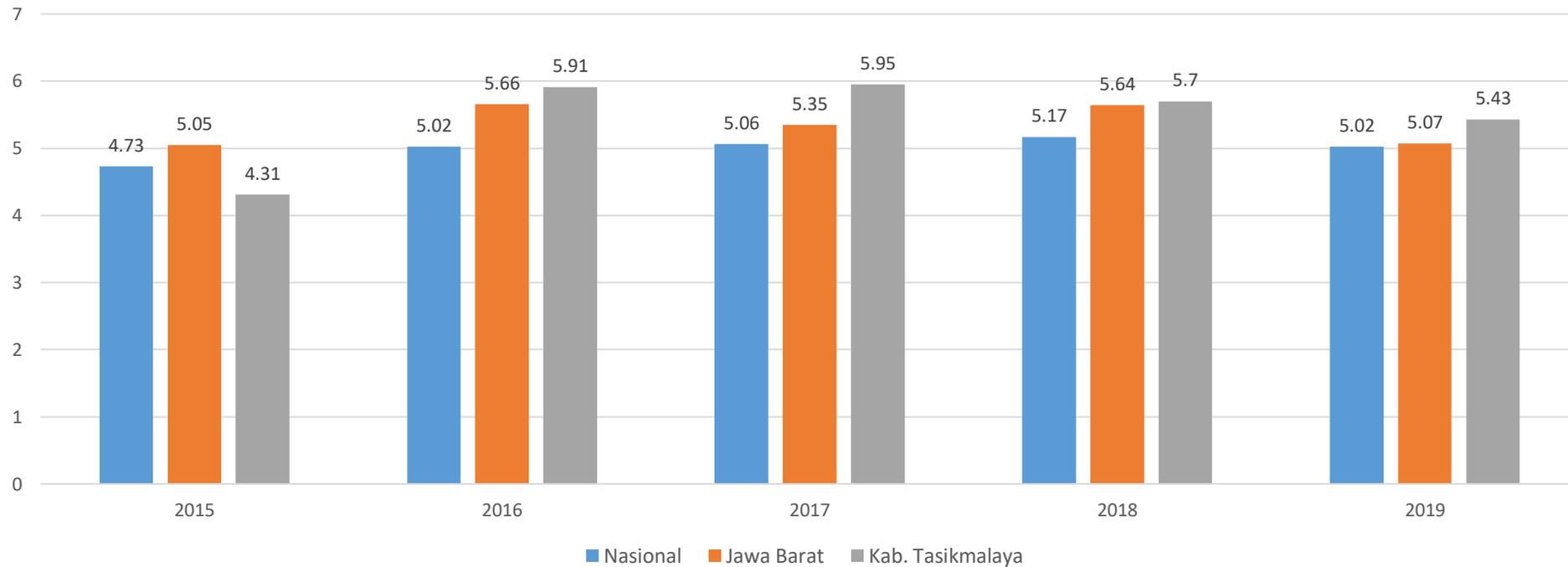
TERIMA KASIH



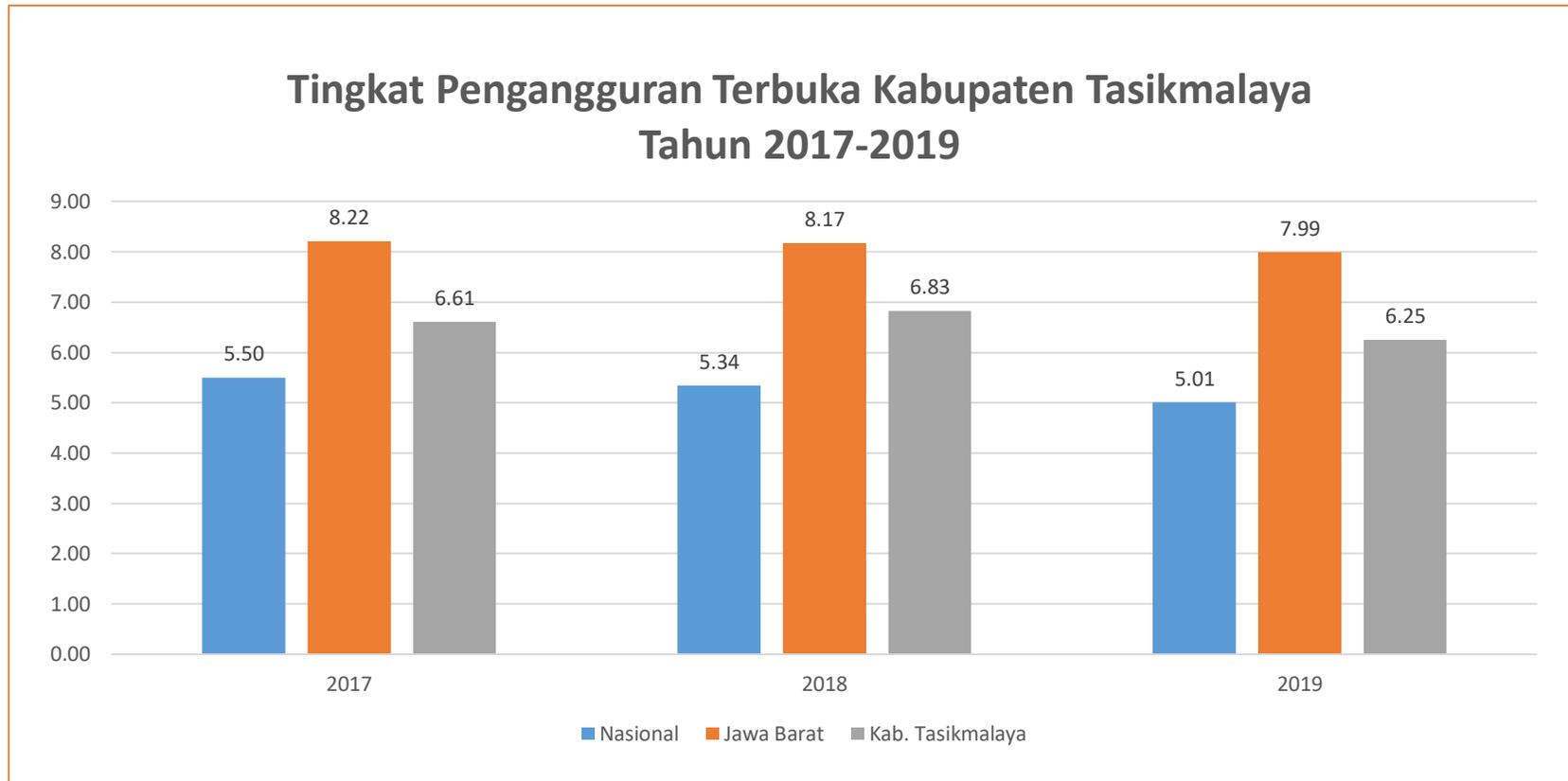


LAMPIRAN

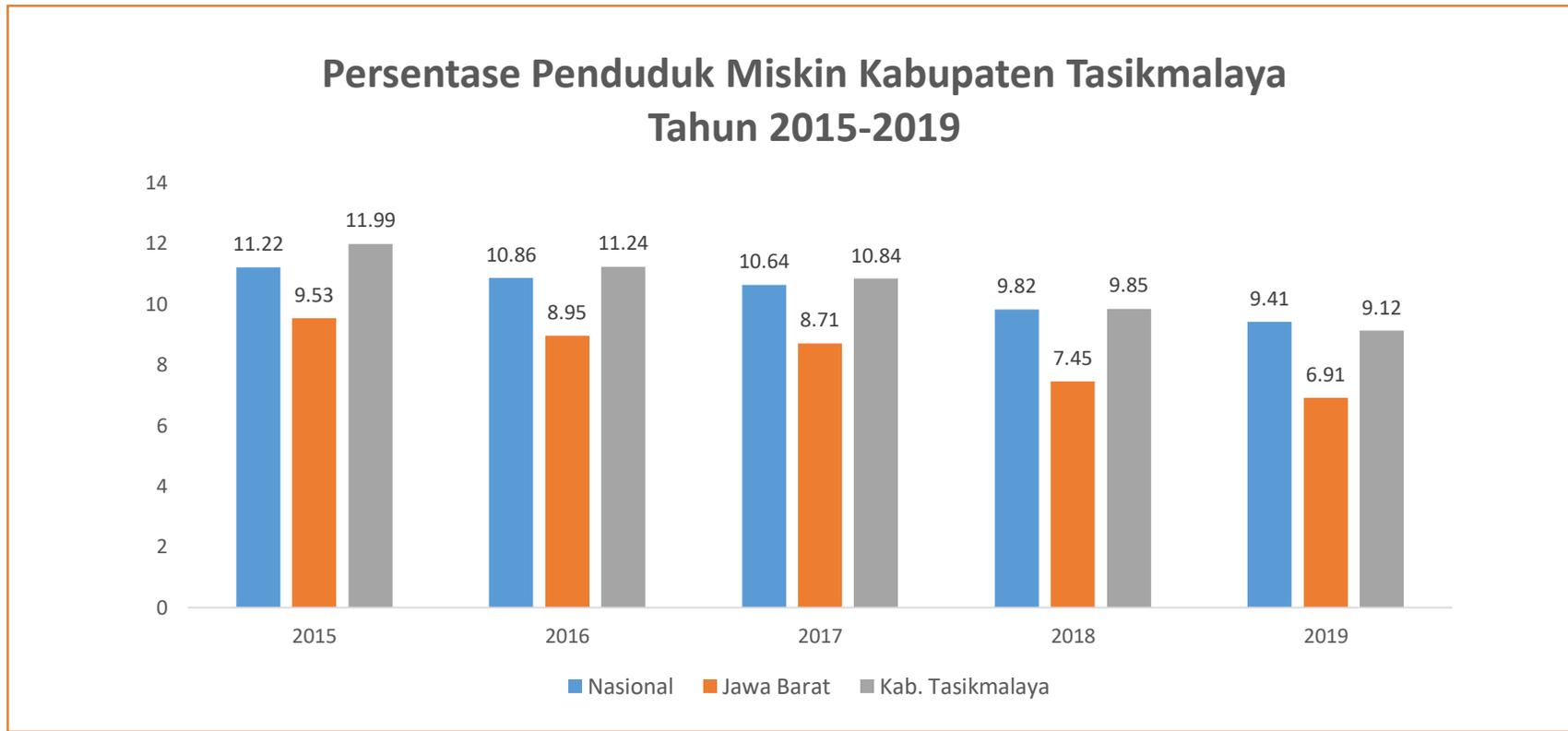
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2019



- Perekonomian Kab. Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dan pada Tahun 2019 turun menjadi sebesar 5,43% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang sebesar 5,7%.
- Kab. Tasikmalaya agar tetap fokus pada sektor-sektor unggulan untuk dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

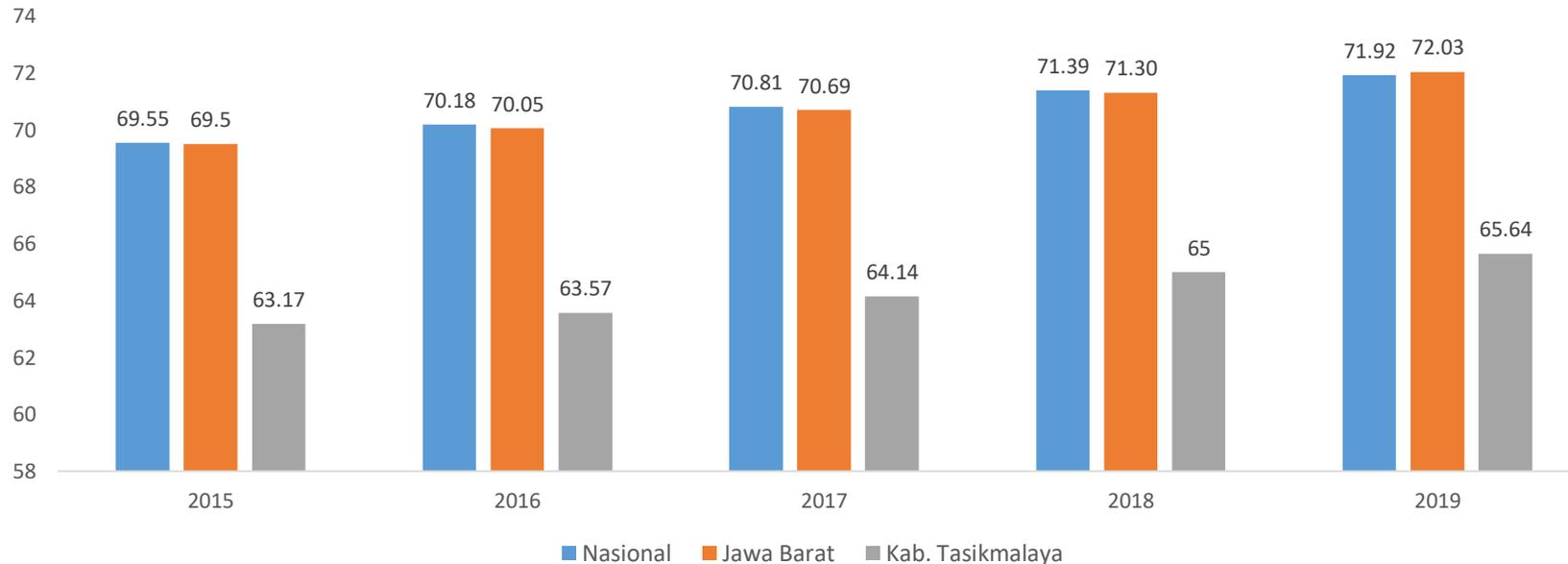


- ❖ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Tasikmalaya tahun 2019 mencapai (6,25%) **berada di bawah rata-rata Prov. Jawa Barat (7,99%) namun di atas Nasional (5,01%)**.
- ❖ Berdasarkan trend selama 2017-2019, TPT Kab. Tasikmalaya mengalami fluktuasi, dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan apabila dibandingkan Tahun 2018.



- ❖ Angka kemiskinan Kab. Tasikmalaya Tahun 2019 sebesar (9,12%) berada **di atas rata-rata Prov. Jawa Barat** yang sebesar (6,91%) namun di bawah rata-rata Nasional (9,41%).
- ❖ Berdasarkan tren tingkat kemiskinan Kab. Tasikmalaya tahun 2015-2019, **kondisinya semakin membaik**, cenderung terus mengalami penurunan, meski masih berada di atas rata-rata Prov. Jawa Barat.

IPM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2019



- ❖ **IPM Kab. Tasikmalaya tahun 2019** sebesar (65,64) **berada di bawah rata-rata Prov. Jawa Barat (72,03) dan nasional (71,92).**
- ❖ Berdasarkan trend selama 2015-2019, IPM Kab. Tasikmalaya **terus mengalami kenaikan**, menunjukkan **pencapaian yang semakin membaik**, meski **masih di bawah Prov. Jawa Barat dan Nasional.**